

SKRIPSI

**PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI
SUMATERA BARAT KURUN WAKTU 2019-2023**

*(Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)*

Oleh:

ASHIMAH KHAIRIYAH

2010112060


PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: ASHIMAH KHAIRIYAH	No. Alumni Fakultas:
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/28 April 2001	f. Tanggal Lulus : 23 Januari 2025	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian
b. Nama Orangtua : Mulyadi, Nurmaida	h. Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan	i. IPK : 3.77	
c. Fakultas : Hukum	j. Alamat : Kalumbuk Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat		
d. PK : Hukum Tata Negara			
e. No. BP : 2010112060			

**PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI SUMATERA BARAT
KURUN WAKTU 2019-2023**

(Ashimah Khairiyah, 2010112060, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Ruang kebebasan sipil merupakan pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi, namun dalam praktiknya kerap mengalami pembatasan melalui pemanfaatan instrumen hukum. Fenomena ini dapat ditemukan di banyak tempat di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana ruang kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023. *Kedua*, Bagaimana peran Komnas HAM dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam memperjuangkan hak kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, ruang kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat mengalami penyempitan yang ditandai dengan adanya pelanggaran hak kebebasan sipil dan politik dalam dua kategori yakni pelanggaran pada saat aksi demonstrasi dan pada konflik agraria. Fenomena yang muncul dari kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pola regresi demokrasi yang diakibatkan oleh obsesi negara terhadap pembangunan, terdapat beberapa regulasi dan kebijakan yang terus dikeluarkan oleh pemerintah dan menyebabkan potensi ancaman bagi masyarakat sipil. Kemudian pemerintah juga merevisi kebijakan yang berpotensi mengancam dan membatasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ruang kebebasan sipil di Sumatera Barat mengalami penyempitan. *Kedua*, Peran Komnas HAM dan Organisasi Non Pemerintahan dalam memperjuangkan hak kebebasan sipil di Sumatera Barat telah berjalan dengan cukup efektif ditandai dengan adanya pengadvokasian kasus dan pemahaman kepada masyarakat yang terdampak pelanggaran maupun tidak. Penelitian ini merekomendasikan, diperlukannya pengawasan dan transparan terhadap penerapan peraturan untuk memastikan regulasi dijalankan secara adil, transparan dan sesuai dengan tujuan awalnya demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif agar menciptakan pemahaman bersama, mencegah konflik dan memastikan aspirasi masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Kebebasan Sipil, Demokrasi dan Represif

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 23 Januari 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Beni Kharisma Arrasuli, S.HI., LLM	Prima Widya Putri, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Hukum: Arfiani, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor almnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: